

POLITIK PEMBANGUNAN ISLAM: STUDI TERHADAP MODEL KOTA MADANI DI BANDA ACEH

Oleh: Maulida Ulfa

Latar Belakang Masalah

Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu provinsi yang memiliki otonomi khusus yang berada di ujung barat Aceh. Dahulunya provinsi tersebut bernama Daerah Istimewa Aceh. Keistimewaan tersebut masih dapat terlihat hingga sekarang yang mana pemerintahannya diberikan kekhususan melalui undang-undang pemerintahan Aceh, salah satunya yakni dapat dijalkannya syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) sesuai dengan cita-cita rakyat Aceh. Selain itu, juga dibentuknya qanun (peraturan daerah) sebagai pendukung daripada pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Ibukota dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Banda Aceh. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan, 17 Mukim, 90 Gampong dengan luas wilayah 61,36 KM² dan jumlah penduduk sebesar 263.589 jiwa. Banda Aceh yang merupakan bekas ibukota Kerajaan Islam terbesar di Nusantara memiliki banyak objek wisata sejarah.¹

Pada pemilihan kepala daerah Banda Aceh tahun 2007, pasangan Mawardy Nurdin dan Illiza Sa'aduddin Djamal terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota untuk periode 2007-2012. Kemudian, pasangan tersebut kembali terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh periode 2012-2017. Akan tetapi, Mawardy Nurdin meninggal pada 8 Februari 2014 akibat penyakit yang di deritanya. Kemudian Illiza menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Walikota Banda Aceh. Beberapa bulan setelah kepergian Alm Mawardy Nurdin, pada 16 Juni 2014 Gubernur Aceh Zaini Abdullah melantik Illiza Sa'aduddin Djamal sebagai

¹ Pemerintah Kota Banda Aceh. 2014. *Profil Kota Banda Aceh*. <http://walikota.bandaacehkota.go.id/profil/index.html> tahun 2014. Di Akses pada tanggal 13 Desember 2015 Pukul 16.13 WIB.

Walikota Banda Aceh dan Zainal Arifin yang terpilih sebagai Wakil Walikota Banda Aceh melalui pemilihan di DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kota) untuk periode 2014 - 2017.²

Sebagai syarat dalam mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota, tentunya pasangan-pasangan calon harus mengajukan visi dan misi mereka terlebih dahulu. Salah satunya yakni pasangan calon walikota dan wakil walikota Banda Aceh untuk periode 2012-2017 yaitu Mawardy Nurdin dan Illiza Sa'aduddin Djamal dimana mereka telah mengajukan visi dan misi mereka ke Kantor Independen Pemilu Banda Aceh. Visi yang mereka gagas yakni Terwujudnya Banda Aceh Model Kota Madani, yang kemudian intinya bahwa kota madani merupakan sebuah kota yang penduduknya beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran terhadap perbedaan, taat terhadap hukum, dan masyarakatnya bebas untuk berpendapat.

Keadaan tersebut nantinya diharapkan akan melahirkan warga Kota Banda Aceh yang memiliki jati diri yang ramah, taat aturan, damai, sejahtera, harga diri tinggi, berbudaya dan juga beradab. Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut, kemudian Mawardy Nurdin dan Illiza Sa'aduddin Djamal menggagas misi yang intinya adalah agar dilakukan penguatan terhadap pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah), sehingga ketika pelaksanaan syariat Islam telah terealisasi dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh, maka akan terciptanya tata pemerintahan yang baik, masyarakat yang sejahtera dengan ekonominya yang mandiri, terbentuknya masyarakat yang berintelektualitas tinggi, sehat, pendidikan yang maju, serta tingginya tingkat partisipasi perempuan.³

Mawardy Nurdin dan Illiza Sa'aduddin Djamal diajukan sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota Banda Aceh oleh Dewan Pimpinan Daerah Kota Banda Aceh atau biasa disebut dengan gabungan dari beberapa partai politik. Partai politik merupakan

² ---, 2014. *Besok, Illiza Resmi jadi Walikota*. <http://aceh.tribunnews.com/2014/06/15/besok-illiza-resmi-jadi-wali-kota> Di Akses pada tanggal 13 Desember 2015 Pukul 16.48 WIB.

³ Lihat lampiran visi dan misi calon walikota dan wakil walikota Banda Aceh tahun 2011.

suatu organisasi politik yang mengakar dalam masyarakat, mempunyai ideologi, memiliki cabang-cabang di daerah, mempunyai kegiatan yang berkelanjutan, ikut di dalam pemilihan umum dan mempunyai wakil di parlemen. Partai politiklah yang nantinya akan menyampaikan informasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat kepada pemerintah, serta mencari para calon untuk jabatan politik.⁴

Partai politik yang mendukung pasangan calon Mawardy Nurdin dan Illiza Sa'aduddin Djamal yakni terdiri dari Partai Demokrat Kota Banda Aceh, Partai Persatuan Pembangunan Kota Banda Aceh, Partai Amanat Nasional Kota Banda Aceh, dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh Kota Banda Aceh. Terdapat delapan kecamatan daerah pemilihan yakni kecamatan Meuraxa, Kuta Raja, Kuta Alam, Syiah Kuala, Ulee Kareng, Baiturrahman, Lueng Bata, dan Jaya Baru. Dari delapan kecamatan tersebut, pasangan Mawardy dan Illiza mendapatkan total jumlah suara yaitu 31.459 suara dan unggul terhadap jumlah suara dari beberapa pasangan calon lain.⁵

Selanjutnya setelah pasangan Mawardy Nurdin dan Illiza Sa'aduddin Djamal terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh periode 2012-2017, maka Banda Aceh pada tahun 2012 memiliki visi yakni Banda Aceh Model Kota Madani. Sedangkan misi untuk mencapai hal tersebut adalah sebagai berikut :⁶ 1. Meningkatkan Kualitas Pengamalan Agama menuju Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah; 2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; 3. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan; 4. Menumbuhkan Masyarakat Yang Berintelektualitas Sehat dan Sejahtera; 5. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Yang Islami; 6. Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Ranah

⁴ Lihat juga Warjio. 2013. *Dilema Politik Pembangunan PKS : Islam dan Konvensional*. Medan: Perdana Publishing. hal. 15.

⁵ Lihat lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kabupaten/Kota.

⁶ Humas Setdakota Banda Aceh. 2012. *Visi dan Misi*. http://www.bandaacehkota.go.id/new/246/269Visi_dan_Misi.html Di Akses pada tanggal 13 Desember 2015 Pukul 22.44 WIB.

Publik dan Perlindungan Anak; 7. Meningkatkan Peran Generasi Muda Sebagai Kekuatan Pembangunan Kota.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi kota Banda Aceh tersebut, maka terdapat enam Qanun kota Banda Aceh tahun 2012, sebagai berikut:⁷

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2011; 2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2012; 3. Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2013.

Gagasan mengenai visi Banda Aceh sebagai model kota madani salah satunya dicetuskan oleh Walikota Banda Aceh yakni Mawardy Nurdin, dimana beliau mengatakan bahwa pembentukan kota madani harus tercapai dalam lima tahun ke depan. Dalam pembentukan kota madani tersebut, beliau meminta kepada tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Banda Aceh 2012-2017 agar meniru konsep Rasulullah Sallallāh ‘alayh wa Sallam dalam membangun kota Madinah, yang meletakkan tiga pilar seperti yang termaktub dalam Piagam Madinah. Menurut Mawardy Nurdin, kota madani adalah sebuah kota yang penduduknya beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum dan memiliki ruang publik yang luas.

Disamping itu masyarakatnya juga ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan, inklusif, mampu bekerjasama untuk menggapai tujuan bersama yang dicitakan. Sehingga beliau berharap bahwa keadaan tersebut dapat membentuk warga Kota Banda Aceh yang memiliki jati diri yang ramah, taat aturan, damai, sejahtera, harga diri

⁷ Bagian Hukum Sekretariat Kota Banda Aceh. ---. *Peraturan Daerah (Perda / Qanun)*. <http://jdih.bandaacehkota.go.id/index.php/produk-hukum> Di Akses pada tanggal 04 Januari 2016, Pukul 13.57 WIB.

tinggi, berbudaya, dan beradab.⁸ Intinya konsep membangun Banda Aceh model kota madani menurut Mawardy Nurdin yakni dengan mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, menjalankan syari'at menurut agama masing-masing, taat hukum, penuh toleran. Masyarakat juga memiliki akses kepada pemerintahan, mengontrol, ikut membicarakan pembangunannya, ikut terlibat dalam pengawasan, dan sebagainya.⁹ Selanjutnya setelah kepergian beliau, maka visi kota Banda Aceh tersebut dilanjutkan oleh Walikota Illiza Sa'aduddin Djamal dan Wakil Walikota terpilih yakni Zainal Arifin.

Dalam upaya untuk membangun Banda Aceh sebagai model kota madani, pembangunan yang dijalankan yaitu pembangunan berteraskan Islam. Menurut Muhammad Syukri Salleh, pembangunan yang berteraskan Islam adalah pembangunan yang bergabung antara dua bentuk pembangunan; pembangunan material dengan pembangunan kerohanian dan dilaksanakan menurut garis panduan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Pembangunan material adalah pembangunan yang dapat menegakkan program-program yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia atau *Habl min al-Nas* seperti pengeluaran dan penggunaan.

Sedangkan pembangunan kerohanian adalah pembangunan yang dapat merapatkan hubungan manusia dengan Allah s.w.t seerat mungkin, melaksanakan syari'at sebaik mungkin dan berakhlak dengan Allah s.w.t setinggi mungkin atau *Habl min Allah* seperti keimanan, ketakwaan dan sebagainya.¹⁰ Islam bukan semata agama, namun juga merupakan sebuah sistem politik. Islam dan politik merupakan sesuatu yang saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain. Hal tersebut didasarkan bahwa

⁸ Dewan Perwakilan Kota Banda Aceh. 2013. *Mawardy Nurdin Minta RPJM Kota Banda Aceh Tiru Konsep Rasulullah*. <http://dprk-bandaaceh.go.id/berita-38-mawardy-nurdin-minta-rpjm-kota-banda-aceh-tiru-konsep-rasulullah.html> Di Akses pada tanggal 14 Desember 2015 Pukul 20.38 WIB.

⁹ Mawardy Nurdin. 2013. *Konsep Membangun Banda Aceh Model Kota Madani*. <http://mawardy-nurdin.blogspot.co.id/2013/07/banda-aceh-model-kota-madani.html> Di Akses pada tanggal 15 Desember 2015 Pukul 21.57 WIB.

¹⁰ Lihat Warjio. 2013. *Politik Pembangunan Islam : Pemikiran dan Implementasi*. Medan: Perdana Publishing. hal. xvi-xvii.

Rasulullah Sallallāh ‘alayh wa Sallam disamping sebagai pemimpin agama, beliau juga adalah seorang ahli negara yang mengendalikan masyarakat madinah.¹¹

Dalam menjalankan pembangunan yang berteraskan Islam tersebut, diharapkan peran pemerintah kota (Walikota dan Wakil Walikota) selaku salah satu aktor politik atau pelaku pembangunan dalam membuat suatu regulasi kebijakan yang tepat bagi Banda Aceh. Selain daripada peran pemerintah kota, juga diharapkan peran dari aktor-aktor politik yang lain maupun masyarakat Banda Aceh sendiri dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Konsep kota madani di Banda Aceh berarti menjadikan kota Banda Aceh sebagai kota yang madani, berbasis syari’at Islam, kota yang modern, yakni berarti bukan jauh dari nilai-nilai agama, akan tetapi tetap dilapisi dengan nuansa-nuansa yang islami.

Selanjutnya dalam proses menjadikan Banda Aceh sebagai model kota madani, telah ada beberapa upaya yang dilakukan yakni misalnya saja dengan membentuk komite penguatan aqidah dan peningkatan syari’at Islam di Banda Aceh, menerapkan program diniyah di sekolah umum dan membentuk lokasi hafiz Qur’an. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji lebih lanjut mengenai Aceh pada masa lampau, munculnya konflik antara pemerintah pusat dengan Aceh, selanjutnya mulai diterapkan syariat Islam di aceh hingga berujung pada munculnya kota madani di Banda Aceh yang berkaca pada kota madani zaman Rasulullah Sallallāh ‘alayh wa Sallam. Selain itu, peneliti juga akan mengkaji mengenai aktor-aktor politik yang terlibat dalam perumusan kota madani, dimana dalam hal ini partai politik ataupun aktor-aktor politik lain tentulah akan menyalurkan aspirasi mereka dalam bentuk sebuah kebijakan. Kemudian, peneliti juga akan mengkaji mengenai model, program, serta tantangan dalam menjadikan Banda Aceh model kota madani.

¹¹ *Ibid.* hal. vxiii.

Metodologi Penelitian

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang berdasarkan fakta dan data-data yang ada.¹² Jenis penelitian deskriptif ini akan peneliti gunakan untuk menjelaskan awal masalah atau objek tertentu secara terperinci. Penelitian deskriptif ini juga akan membantu penulis dalam menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai keadaan objek atau subjek tertentu secara rinci.¹³

Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertumpu pada pemahaman mengenai berbagai masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang kompleks dan juga rinci. Menurut Bogdan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁴ Metode penelitian kualitatif ini nantinya akan membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang spesifik dari para informan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema yang umum, dan juga akan membantu peneliti dalam menafsirkan makna data.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengungkapkan fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek

¹² Bambang Prasetyo dkk. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 42.

¹³ Lihat Bagong Suyanto dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada. hal. 17-18.

¹⁴ Andi Prastowo. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Depok: Ar-Ruzz Media. hal. 22.

yang diteliti dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat. Penelitian ini dilakukan di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam.

Teknik Pengumpulan Data

a) **Data Primer**, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di objek penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik wawancara, dimana nantinya peneliti akan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan guna mengumpulkan data. Adapun yang menjadi informan dalam wawancara ini adalah orang-orang yang bersangkutan, diantaranya sebagai berikut :

- Bachtiar, S.Sos, Asisten I Bidang Pemerintahan Kantor Balai Kota Banda Aceh
- Nasrullah, Sekretaris Dewan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh
- Bachtiar Hasan, Kepala Bidang Bina Ibadah dan Muamalah (BIM) Kantor Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
- Burhanuddin, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh
- Hardi, Komandan Operasi Satpol PP/WH Kota Banda Aceh
- Juanda Jamal, Sekretaris Jendral LSM *Aceh Civil Society Task Force* (ACSTF) Kota Banda Aceh
- Muhammad Yasir Yusuf, Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Banda Aceh
- Yarmen Dinamika, Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia Banda Aceh
- Murdani, Pegawai Kantor Camat Kota Banda Aceh

¹⁵ Burhan Bungin. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada. hal. 132.

- b) **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber kedua atau data yang dapat diperoleh melalui buku, jurnal, karya ilmiah, dokumen resmi, internet, ataupun literatur lain yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil Penelitian

Politik Pembangunan Islam Terhadap Model Kota Madani Banda Aceh

Kemunculan Banda Aceh model kota madani telah tertuang dalam visi yang diikuti dengan tujuh misi pendukungnya untuk periode 2012-2017. Dalam menjadikan Banda Aceh sebagai model kota madani, pihak pemko (walikota dan wakil walikota) beserta muspida terkait merujuk pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah. Rasulullah meletakkan tiga tonggak dasar dalam membangun Madinah. Tentu saja hal tersebut bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist. Dalam menjadikan Banda Aceh model kota madani, ada beberapa program yang telah dijalankan. Namun, dalam menjalankan program-program tersebut tidak terlepas dari tantangan yang akan dihadapi oleh seluruh elemen rakyat Banda Aceh. Salah satu syarat utama dalam menjadikan Banda Aceh model kota madani adalah syariat Islam yang harus ditegakkan. Ada beberapa hal terkait latar belakang dan konsep model kota madani Banda Aceh, program serta tantangannya.

Pertama, latar belakang dan konsep model kota madani Banda Aceh. Terkait dengan latar belakang, Banda Aceh merupakan sebuah kota yang penuh dengan toheran sejarah. Sejarah mencatat bahwa Banda Aceh adalah ibukota Kerajaan Aceh Darussalam yang dibangun oleh Sultan Johan Syah dan menjadi kota Islam tertua di Asia Tenggara. Selama berpuluh tahun, Aceh berada dalam masa konflik

berkepanjangan. Selain itu, Aceh juga mendapat banyak hambatan dalam menegakkan syariat Islam secara kaffah di bumi Serambi Mekkah tersebut. Namun setelah bencana tsunami melanda tahun 2004, pada tahun 2005 muncul titik terang dimana terwujudnya kesepakatan damai antara pihak pemerintah pusat dan GAM yang menandai babak baru bagi Aceh, yang dikenal dengan MoU Helsinki.

Hal tersebut kemudian menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi Aceh. Tentunya sebagai ibukota dari Provinsi Aceh (Nanggore Aceh Darussalam), maka Banda Aceh juga tidak terkecuali dalam hal ini. Beberapa dampaknya dapat dilihat melalui tiga ruang lingkup, yaitu ruang lingkup sosial, ekonomi, dan politik. Dalam ruang lingkup sosial, dapat dilihat melalui diterapkannya syariat Islam secara menyeluruh di Aceh melalui dibentuknya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tahun 2006. Selanjutnya dalam ruang lingkup ekonomi, yakni sebelum tsunami dan Mou Helsinki disepakati, kondisi perekonomian Aceh sangatlah miris terutama akibat dari konflik yang terjadi berkepanjangan. Namun setelah tsunami dan Mou Helsinki telah disepakati, kondisi perekonomian Aceh mulai membaik dimana infrastruktur seperti gedung pemerintahan, pasar-pasar, sekolah-sekolah sudah mulai dibangun.

Kemudian dari segi politik, peran GAM dalam proses reintegrasi menjadi penting untuk diperhatikan, terutama dengan masuknya kalangan GAM ke dalam pemerintahan lokal pasca pilkada langsung pada Desember 2006. Kemenangan tersebut telah membuka jalan bagi kalangan GAM, yang sebelumnya bukan hanya berada di luar melainkan juga berhadapan dengan pemerintah, untuk terlibat langsung dalam proses kebijakan publik di Aceh.

Roda kepemimpinan Aceh khususnya Banda Aceh sebagai ibukotanya terus bergulir. Dalam setiap perjalanan panjang yang dilalui oleh para pemimpin dalam memimpin kota Banda Aceh agar menjadi lebih baik, kesempatan yang semakin terbuka lebar dimanfaatkan oleh mereka dengan sebaik-baiknya. Para pemimpin kota Banda Aceh tadi (walikota dan wakil walikota) menuangkan pikiran-pikiran mereka ke dalam visi dan misi kota Banda Aceh yang nantinya akan dipergunakan sebagai pedoman dalam membangun kota Banda Aceh.

Terkait dengan konsep model kota madani Banda Aceh, kota Banda Aceh dalam membangun kotanya, berusaha berpedoman pada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallāh ‘alayh wa Sallam di Madinah. Dalam paparan visi dan misi pencalonan yang Mawardy Nurdin dan Illiza Sa’aduddin Djamal sebutkan, bahwasanya:¹⁶

“Jika dicermati lebih mendalam, maka konsep Banda Aceh pada masa itu laksana merujuk pada pola Rasulullah Muhammad SAW dalam membangun kota Madinah setelah hijrah dari Mekkah. Rasul membangun kota di sebuah kawasan yang semula bernama Yastrib menjadi Madinah –berarti kota. Cendekiawan Nurcholis Madjid menyebutkan kota Madinah ini berasal dari maddaniyah (peradaban).”

Kemudian, mereka juga menyebutkan bahwa dalam beberapa literatur yang ada, Rasulullah meletakkan tiga tonggak masyarakat madani. Di antaranya yaitu beliau memperkokoh hubungan kaum muslim dengan Tuhannya, memperkuat hubungan intern umat Islam yakni dengan mempersaudarakan kaum pendatang dari Mekah (kaum Muhajirin) dengan penduduk asli Madinah (kaum Anshor), dan juga

¹⁶ Visi dan Misi : Terwujudnya Banda Aceh Model Kota Madani Visi dan Misi : Terwujudnya Banda Aceh Model Kota Madani dari arsip dokumen yang diperoleh dari kantor Komisi Independen Pemilihan Banda Aceh.

mengatur hubungan umat Islam dengan orang-orang diluar Islam. Kesimpulannya maka dapat melahirkan karakter masyarakat yang berakhlak, persatuan dan kesatuan umat, tidak fanatis terhadap ikatan-ikatan kesukuan, menegakkan hak asasi manusia, anti-otoriterisme, memiliki ruang publik yang luas, dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kekuasaan. Selain itu masyarakatnya taat hukum, tidak barbarian, toleran dalam perbedaan, dan memiliki kemampuan untuk bekerjasama dalam menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Seperti itulah kota Madinah yang dibangun oleh Rasulullah.

Tidak berbeda jauh dengan hal tersebut, menurut Bachtiar yang menjabat sebagai Asisten I di kantor pemerintah kota Banda Aceh, beliau mengatakan sebagai berikut:¹⁷

“Kita melihat bahwa di Aceh ini adalah mayoritas umat Islam. Sehingga sudah selayaknya penduduk Aceh yang bermayoritas Islam berkomitmen menjalankan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Madani kan diartikan secara Islam yang kita pahami ini adalah kota yang berperadaban, kota yang taat kepada Rasul, yang ketiga taat kepada pemimpin, yang keempat taat kepada hukum. Hal itu merupakan kota yang madani. Selain itu juga penuh toleransi, menghargai semua komponen kehidupan yang ada di Aceh.”

Dalam membangun kotanya, Banda Aceh berpedoman pada apa yang dilakukan Rasulullah di Madinah, seperti yang termaktub dalam Piagam Madinah. Pertama, memperkokoh hubungan kaum muslim dengan Tuhannya. Di Banda Aceh, hal tersebut dapat dilihat melalui banyaknya masjid dan juga banyak dilakukannya kegiatan keagamaan seperti ceramah, pengajian, ataupun perwiritan, guna menanamkan rasa cinta kepada Tuhannya. Kedua, memperkuat hubungan intern umat

¹⁷ Wawancara Bachtiar S.Sos, Asisten I Bidang Pemerintahan di Kantor Pemerintah Kota Banda Aceh, 26 Januari 2016.

Islam. Dalam hal ini dapat dilihat di Banda Aceh, bahwa pendatang yang bukan berasal dari Aceh yang beragama muslim dapat diterima dengan baik, karena sesama umat muslim itu bersaudara. Ketiga, mengatur hubungan Islam dengan orang-orang diluar Islam. Hal tersebut dapat dilihat di Banda Aceh dari terjalinnya hubungan yang baik antara warga asli yang memang Islam dan juga warga pendatang yang non muslim. Maka munculnya konsep mengenai Banda Aceh sebagai model kota madani telah diupayakan agar selaras pada konsep yang dijalankan oleh Rasulullah di Madinah, walaupun masih membutuhkan proses untuk dapat mencapai taraf tersebut.

Kedua, para aktor politik yang terlibat berupaya agar program yang dijalankan tetap berdasarkan syariat Islam. Adapun program-program yang mereka buat dan jalankan merupakan realisasi dari visi dan misi Banda Aceh 2012-2017, sebagai berikut:¹⁸ *Misi 1*, Meningkatkan Kualitas Pengamalan Agama Menuju Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah, dimana beberapa program yang dijalankan yakni Pembentukan KPA-PAI (Komite Penguatan Aqidah Akhlak dan Peningkatan Amalan Islam); Mengembangkan Pendidikan Diniyah di semua jenjang pendidikan; Pembinaan Hafizh dan Hafizhah. *Misi 2*, Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, salah satunya yaitu pihak pemko Banda Aceh telah mengeluarkan E-Kinerja yang merupakan salah satu program untuk mengeluarkan dan melakukan penilaian kinerja dan satuan kerja, monitoring kinerja dilakukan secara online dan real time. *Misi 3*, Memperkuat Ekonomi Kerakyatan, beberapa programnya yakni Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM sebesar 5 Milyar), mengadakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM sebesar 3,6 Milyar), Mengalokasikan Dana Gampong (ADG sebesar 9 Milyar). *Misi 4*, Menumbuhkan Masyarakat yang Berintelektualitas Sehat dan Sejahtera, beberapa programnya yaitu mengadakan

¹⁸ Program-program pembangun Banda Aceh Model Kota Madani terdapat dalam slide yang diperoleh dari Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015.

Program pendidikan tanpa hambatan biaya, Beasiswa bagi masyarakat miskin, Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, Wajib belajar 12 tahun. Di bidang kesehatan yaitu tersedia layanan gratis bagi masyarakat miskin dan pelayanan kesehatan dasar, dibentuk program layanan kesehatan peduli remaja pada seluruh puskesmas.

Misi 5, Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Yang Islami, salah satunya Pemerintah Kota Banda Aceh akan menjalin kerjasama dengan Asosiasi Travel Asia Pasifik atau *Pacific Asia Travel Association* (PATA). Walikota Banda Aceh, Illiza mengatakan bahwa konsep wisata yang akan dibangun nantinya adalah wisata yang merujuk pada konsep yang menjadikan Banda Aceh sebagai miniatur kota Mekkah di Indonesia. *Misi 6*, Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Ranah Publik, misalnya Pembentukan Women Development Centre (WDC) pada tahun 2007, Menginisiasi Musyawarah Rancangan Aksi Perempuan (Musrena) sejak tahun 2007. *Misi 7*, Meningkatkan Peran Generasi Muda Sebagai Kekuatan Pembangunan Kota, misalnya melakukan Pembinaan 67 Organisasi Kepemudaan pada tahun 2013, Melakukan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan pemuda dan OSIS Kota Banda Aceh.

Ketiga, para aktor politik masih memiliki kendala dan tetap harus berupaya agar dapat mewujudkan Banda Aceh model kota madani. Berbagai kendala maupun tantangan yang dihadapi tersebut antara lain yaitu masih harus ditingkatkan lagi kualitas pengamalan agama, yakni tegaknya syariat Islam. Seperti berita yang terdapat pada *Harian Waspada* beberapa bulan lalu, kasus Gay malah merajarat para pelajar Aceh. Kelompok gay di kota Provinsi Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya.¹⁹ Kondisi ini sungguh memprihatinkan mengingat fondasi utama

¹⁹ ---, 2016. *Traffic Light Kota Banda Aceh Terabaikan*. *Harian Waspada*. hal. C7.

terwujudnya Banda Aceh model kota madani adalah harus tegaknya syariat Islam dalam diri setiap elemen masyarakat Aceh. Kemudian dari segi fasilitas publik juga masih harus dilakukan pembenahan, dimana beberapa fasilitas seperti fasilitas bermain anak di Taman Sari Banda Aceh, Gapura Pasar Aceh, dan sejumlah sarana lain, harus dilakukan perbaikan dan dirawat agar masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak pemerintah Kota Banda Aceh dan segenap jajaran dinas yang terkait. Ketergantungan dari segi ekonomi harus segera diatasi. Selain itu masih rendahnya tingkat kesadaran atau mentalitas masyarakat misalnya saja dalam pelanggaran lalu lintas yang marak terjadi. Serta tingkat penegakan hukum yang masih rendah.

Penutup

Politik Pembangunan Islam Terhadap Model Kota Madani merupakan cara-cara yang digunakan oleh para aktor politik (dalam hal ini pihak pemko dan muspida kota Banda Aceh) dalam konteks pembangunan yang dilakukan dengan cara-cara Islam. Model kota madani Banda Aceh maupun programnya telah dibuat dan dijalankan agar dapat tegaknya syariat Islam secara kaffah di bumi Serambi Mekkah tersebut. Namun, tetap terdapat tantangan maupun hambatan yang dihadapi oleh pihak pemko, muspida terkait dan seluruh elemen masyarakat Banda Aceh khususnya dalam menjadikan Banda Aceh model kota madani. Terdapat tiga hal penting dalam politik pembangunan Islam terhadap model kota madani di Banda Aceh: pertama, pihak pemko Banda Aceh yakni Walikota dan Wakil Walikota yang menggagas ide mengenai Banda Aceh model kota madani, dimana konsepnya merujuk pada apa yang

dilakukan Rasulullah di Madinah; Kedua, para aktor politik yang terlibat berupaya agar program yang dijalankan tetap berdasarkan syariat Islam; Ketiga, para aktor politik masih memiliki kendala dan tetap harus berupaya agar dapat mewujudkan Banda Aceh model kota madani.